

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP *AUDIT REPORT LAG*
DENGAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian Program Sarjana (S1)
pada Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh:

ANGELIN SWIETENIA LESTARI TEO ARSI

11 15 27960

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2019

SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE, AUDIT TERHADAP *AUDIT REPORT* *LAG* DENGAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ANGELIN SWIETENIA LESTARI TEO ARSI

No Induk Mahasiswa: 1115 27960

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 15 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing I



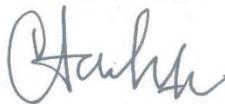
Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji



Enny Pudjiastuti, Dra., MBA., Ak., CA.

Pembimbing II



Cahyo Indraswono, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP *AUDIT REPORT LAG* DENGAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik-karakteristik komite audit yang berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Karakteristik-karakteristik yang diuji dalam penelitian ini adalah independensi komite audit, rapat komite audit, kompetensi: keahlian dibidang keuangan, jumlah komite audit, dan masa jabatan komite audit sebagai variabel independen serta reputasi kantor akuntan publik sebagai variabel pemoderasi. Sedangkan *audit report lag* sebagai variabel dependen.

Sampel penelitian ini terdiri dari 78 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive non random sampling*. Model analisis menggunakan analisis linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel karakteristik komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan reputasi kantor akuntan publik tidak mampu memoderasi pengaruh karakteristik komite audit terhadap *audit report lag*.

Kata Kunci: *audit report lag*, independensi komite audit, rapat komite audit, kompetensi: keahlian dibidang keuangan, jumlah komite audit, masa jabatan komite audit, reputasi kantor akuntan publik

Abstract

The purpose of this research is to analyze audit committee characteristics that effect audit report lag to the manufacture companies listed in the Indonesia Stock Exchange. The characteristic of the audit committee are audit committee independence, audit committee meeting, audit committee expertise, audit committee total, and audit committee tenure as a independen variable with the reputation of a public accounting firm as a moderating variable. While the audit report lag as dependent variable.

The sample consist of 78 companies listed in the Indonesia Stock Exchange in the period 2015-2017. The data that was used in this research was secondary data and selectin by using purposive non random sampling method. Model analysis using multiple linier regression analysis.

Based on analytical result shows audit committee expertise that have significant influence toward audit report lag, while the reputation of a public accounting firm is not able to moderate the influence of the audit committee characteristics on audit report lag.

Keywords: *audit report lag, audit committee independence, audit committee meeting, audit committee expertise, audit committee total, audit committee tenure, reputation of a public accounting firm*

1. Pendahuluan

Laju pertumbuhan bisnis dunia saat ini sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan baru yang mendaftar sebagai perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini tercatat 626 perusahaan yang tercatat di BEI. Perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI ini, diwajibkan untuk menyampaikan informasi keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) agar tepat guna untuk para pemakainya. Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan akan dimuat dalam laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan keuangan tersebut berisikan pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan dan tanggung jawab direksi atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal atau mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal emiten merupakan perusahaan efek.

Laporan keuangan yang disajikan perusahaan merupakan laporan keuangan hasil audit dari akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) menyatakan bahwa laporan keuangan berguna dalam memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan suatu entitas serta membantu dalam membuat keputusan ekonomi (Haron *et al.*, 2006). Dalam mengaudit suatu laporan keuangan, ada beberapa standar yang harus dijalani auditor dalam memeriksa laporan keuangan tersebut. Hal ini mengakibatkan lamanya waktu pelaporan hasil audit. Auditor harus menyelesaikan proses audit dengan tepat waktu agar laporan keuangan yang diaudit tersebut dapat bernilai guna. Tepat waktu artinya dapat memanfaatkan informasi yang telah diperoleh sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuan untuk mengambil keputusan.

Suhayati (2014) menyatakan kantor akuntan publik dengan reputasi yang baik mampu meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Kantor akuntan publik yang memiliki reputasi baik berafiliasi dengan kantor akuntan publik universal seperti *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big Four)*. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* biasanya lebih awal dalam menyelesaikan auditnya dibandingkan dengan KAP non *Big Four*. Hal tersebut dikarenakan Kantor Akuntan Publik *Big Four* memiliki ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia yang lebih spesialis sehingga membuat pekerjaan audit yang dilakukan lebih efisien (Lee, 2008). Adanya tenaga spesialis pada Kantor Akuntan Publik *Big Four* yang memiliki kompetensi, keahlian dan kemampuan dapat mempercepat proses audit dan mempersingkat *audit report lag* (Lee, 2008). Perbedaan batas waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal penandatanganan laporan keuangan oleh auditor di dalam akuntansi disebut dengan *audit report lag*. *Audit report lag* yang berlebihan membahayakan kualitas laporan keuangan (Hashim dan Rahman: 2011).

Ada beberapa perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Menurut berita yang dilansir situs CNN Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia mengganjar denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015 (Kamis, 30 Juni 2016). Selanjutnya tahun 2017 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan efek (suspensi) di pasar reguler dan tunai terhadap 17 perusahaan tercatat atau emiten pada perdagangan 3 Juli 2017 (Senin, 03 Juli 2017). Berdasarkan ketentuan II.6.3 Peraturan BEI Nomor I-H tentang sanksi, PT Bursa Efek Indonesia memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan.

Penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag dengan menjadikan perusahaan di sektor manufaktur sebagai obyek penelitian. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan atau badan usaha yang melakukan aktivitas pengolahan bahan mentah ataupun bahan setengah jadi. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 144 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dibagi dalam tiga sektor utama yaitu sektor Industri Dasar dan Kimia, sektor Aneka Industri, dan sektor Industri Barang Konsumsi.

Beberapa faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi audit report lag yaitu: independensi komite audit, jumlah rapat komite audit, kompetensi anggota komite audit, jumlah anggota komite audit, dan masa jabatan komite audit. Berdasarkan beberapa faktor di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan antara ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan karakteristik komite audit. Penelitian tentang audit report lag dan komite sudah banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Penelitian Ika (2011) menunjukkan bahwa independensi komite audit dan rapat komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap audit report lag, sedangkan kompetensi anggota komite audit dan jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh terhadap audit report lag dengan arah negatif.

Hashim dan Rahman (2011) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap audit report lag di Malaysia. Penelitian ini menggunakan variabel independen komite audit, jumlah rapat komite audit dan keahlian komite audit untuk menganalisis pengaruhnya terhadap audit report lag. Penelitian ini menyatakan bahwa independensi komite audit serta keahlian komite audit berkontribusi sebagai faktor penting yang mempengaruhi audit report lag sebuah perusahaan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kartika (2009) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay di Indonesia. Penelitian ini melaporkan bahwa faktor total asset, laba rugi operasi, mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap audit delay perusahaan. Opini auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap audit delay perusahaan. Sedangkan faktor profit dan reputasi auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Audit Report Lag dengan Reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai Variabel Pemoderasi”

2. Tinjauan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Agency Theory

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain (*agents*). *Agents* akan melakukan semua kegiatan atas perintah *principals* dalam rangka pengambilan keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Apabila kedua belah pihak antara *principal* dan *agent* mempunyai tujuan yang sama, maka diyakini *agent* akan bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Dengan demikian teori keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik dan pemegang saham (*principal*) yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan dengan manajemen (*agent*) yang mengelola kekayaan perusahaan serta menyusun laporan keuangan.

Dalam praktiknya, *principal* dan *agent* tidak selalu memiliki kepentingan yang sama. Teori agensi didasari oleh tiga asumsi. Asumsi-asumsi tersebut antara lain asumsi tentang sifat individu, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi (Eisenhardt, 1989). *Agent* yang didasari oleh sifat dasar individu cenderung termotivasi untuk mengutamakan kepentingan dirinya sendiri sehingga akan menimbulkan benturan kepentingan antara *agent* dan *principal*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

atau yang disebut dengan conflict of interest. Permasalahan akibat perbedaan kepentingan ini biasa disebut agency problem.

Kecenderungan orang yang suka mementingkan dirinya sendiri dan munculnya kepentingan yang bertentangan di dalam suatu aktivitas merupakan penyebab agency theory (Jensen, 1986). Agent menyalahgunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi dengan cara memberikan atau menahan informasi yang diminta principal bila menguntungkan bagi agen.

Terdapat dua macam agency problems yang dikemukakan oleh Arrow (1985) yaitu:

1. Moral hazard merupakan suatu keadaan dimana pemegang saham sebagai principal tidak dapat melakukan pengamatan secara detail apakah manajemen sebagai agents sudah membuat keputusan secara tepat.
2. Adverse selection, merupakan suatu keadaan dimana principal tidak dapat mengecek apakah hasil pengamatan yang dilakukan agents telah dipakai dengan baik untuk membuat keputusan sesuai kepentingan principal.

Dalam hal ini auditor diperlukan untuk menjembatani kepentingan antara principal dengan agents dalam mengelola keuangan perusahaan. Laporan keuangan audit yang dihasilkan oleh auditor berguna untuk pengambilan keputusan principal.

2.1.2. Komite Audit

Sejak tahun 2001 komite audit sudah ada untuk perusahaan terbuka melalui surat edaran BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan) No: SE-03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya komite audit dimiliki oleh setiap emiten. Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 menyatakan Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Audit diatur dalam surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Pasal 4 yaitu Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama memastikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terutama transparant dan disclosure ditetapkan secara konsisten. Utama (2004) menjelaskan komite audit beranggotakan pihak-pihak diluar perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan operasi manajemen atau tidak memiliki hubungan dengan entitas terkait dan mempunyai tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal dan sistem pelaporan keuangan mampu mempertahankan independensi. Salah satu kelebihan komite audit yaitu mampu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai pengembangan berkaitan dengan usaha suatu entitas untuk memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance sehingga dapat mengurangi risiko konflik keagenan.

2.1.3. Independensi Komite Audit

Independen merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan audit, dimana dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus menerapkan lima konsep utama salah satunya adalah independensi. Karena melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum maka seorang auditor harus memiliki sifat tidak mudah dipengaruhi (Agoes, 2012). Komisaris Independen beranggotakan Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan

Publik dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (OJK, 2015). Persyaratan independensi dalam Seksi 290 Kode Etik mewajibkan setiap praktisi untuk bersifat sebagai berikut (Haryono, 2014):

1. Independensi dalam pemikiran.

Independensi dalam pemikiran berkaitan dengan sikap mental seorang komite audit yang memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisisme profesional sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pendapat profesional.

2. Independensi dalam penampilan

Syarat independensi ini dilakukan untuk mencegah munculnya keraguan dari pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) terhadap integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari anggota tim *assurance*, Kantor Akuntan Publik, atau Jaringan Kantor Akuntan Publik.

2.1.4. Rapat Komite Audit

Dewan Direksi membahas tentang proses pelaporan keuangan dan pemantauan terhadap pelaporan keuangan dalam pertemuan komite audit. Pertemuan komite audit merupakan wadah untuk mempertanggung jawabkan fungsi komite audit sendiri kepada Dewan Komisaris dan secara tidak langsung kepada perusahaan (Risty dan Sany, 2015). Umumnya rapat komite audit diadakan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002).

Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Pasal 13 menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Apabila dianggap perlu, komite audit dapat mengundang pejabat eksekutif khususnya pejabat dibidang keuangan untuk menghadiri rapat-rapat komite audit. Menurut FCGI (2002) direktur keuangan dan kepala satuan kerja audit intern dan seorang wakil dari auditor eksternal harus hadir sebagai peserta pada rapat-rapat komite audit.

Hasil rapat komite audit disampaikan dalam surat edaran yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Dewan komisaris akan mendapatkan laporan aktivitas pertemuan komite audit dari ketua komite audit. Apabila ditemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris dalam kurun waktu sepuluh hari kerja. Menurut Sari (2014) audit report lag dapat dipersingkat apabila intensitas pertemuan yang cukup sering oleh komite audit. sehingga dapat segera menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang ditemukan.

2.1.5. Kompetensi: Keahlian Keuangan Komite Audit

Kemampuan yang dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan disebut kompetensi. Komite audit harus memiliki keahlian dalam bidang keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai auditor. Komite audit harus bisa menganalisis masalah dan mengerti mengenai sistem yang diterapkan dalam perusahaan. Anggota komite audit sekurang kurangnya ada satu orang yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan (Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Pasal 7).

Berdasarkan pedoman corporate governance, anggota komite audit harus memiliki

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Anggota komite audit harus memahami mengenai pelaporan keuangan. Apadore dan Noor (2013) menyatakan komite audit yang berpengalaman dalam memahami dan mengoperasikan tugas yang dipercayakan kepada mereka dapat lebih memudahkan dalam mengidentifikasi kesalahan dan berkomunikasi dengan auditor eksternal.

Securities and Exchange Commission (Purwati, 2006) memberikan kriteria “*financial expert*” dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, *controller*, *chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis.
2. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan
3. Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan
4. Pengalaman dalam pengendalian internal
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran, *accruals*, dan cadangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur tentang kompetensi komite audit:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

2.1.6. Jumlah Anggota Komite Audit

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan komite audit beranggotakan paling sedikit tiga orang. Namun jumlah anggota komite audit di Indonesia bermacam-macam tergantung besar kecilnya organisasi dan tanggung jawab. Jumlah anggota komite audit yang cukup ideal kira-kira tiga sampai 5 orang.

Kalbers dan Fogarty (1993) menyatakan kualitas dari laporan keuangan akan semakin meningkat dan audit report lag akan menurun biasanya dikarenakan banyak jumlah anggota komite audit. Jumlah anggota komite audit yang banyak cenderung memiliki kekuatan atau power yang lebih besar, memiliki banyak sumber daya (Pincus et al.,1989) serta berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan.

2.1.7. Masa Jabatan Komite Audit

Berdasarkan keputusan No. 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Bab II Pasal 8 dalam Anggaran Dasar menjelaskan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Pengalaman anggota Komite Audit bekerja di sebuah Kantor Akuntan Publik akan memperkuat keahliannya dalam bidang akuntansi dan audit. Keahlian yang dimiliki anggota Komite Audit ini dapat diimplementasikan dalam proses pelaporan keuangan, sehingga laporan dapat memiliki informasi yang relevan dan yang terpenting dipublikasikan tepat pada waktunya.

2.1.8. Reputasi Kantor Akuntan Publik

Reputasi adalah faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan dan independensi auditor. Auditor memiliki insentif mempertahankan independensi untuk melindungi reputasi mereka, dengan demikian membantu mereka untuk memberikan kualitas audit yang baik. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik (OJK, 2017). Kantor Akuntan Publik setidaknya memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu pemimpin Rekan KAP. Reputasi Kantor Akuntan Publik menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor. Kantor Akuntan Publik berdasarkan reputasinya diklasifikasikan menjadi dua yakni kantor akuntan publik big four dan kantor akuntan publik non big four. Kantor akuntan publik berskala besar biasanya kantor akuntan publik yang sudah dikenal internasional dimana menyediakan jasa audit yang lebih berkualitas daripada Kantor Akuntan Publik berskala kecil (Choi et al, 2010).

Syarat pendaftaran membuka kantor akuntan publik menurut Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki izin yang masih berlaku dari Menteri
2. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak tercantum dalam daftar kredit atau pembiayaan macet.
4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Rekan AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu pemimpin Rekan KAP
5. Dalam hal KAP hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, KAP harus membuat surat perjanjian kerja sama dengan KAP lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Rekan AP yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugas, dengan ketentuan bahwa KAP lain mempunyai Rekan AP yang tercatat pada daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan.

Krishan & Schauer (2001) menyatakan reputasi Kantor Akuntan Publik dapat diproksi dengan ukuran Kantor Akuntan publik. Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi baik cenderung lebih cepat menyelesaikan audit dikarenakan Kantor Akuntan Publik tersebut memiliki staf yang berkualitas (Boynton; 2001).

2.1.9. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-346/BL/2011 menyatakan emiten wajib menyampaikan laporan keuangan berkala yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan kepala BAPEPAM paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, dan wajib diumumkan ke publik paling tidak melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang peredaran nasional.

Wirakusuma (2004) mengatakan faktor utama yang mempengaruhi proses penyajiannya ke publik adalah lamanya waktu yang dibutuhkan akuntan publik untuk menyelesaikan proses pengauditan hingga penyajian opini atas laporan keuangan auditan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Karakteristik kualitas laporan keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) nomor 1 berisi empat karakteristik kualitas pokok yang merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya, yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan adalah mudah untuk dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang cukup tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Informasi yang relevan memberi manfaat untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan dan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.

3. Keandalan

Informasi yang andal (*reliable*) artinya bebas dari penyesatan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai sajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan apabila penyajian informasi tidak dapat diandalkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi Organisasi untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

4. Dapat Dibandingkan

Pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai laporan keuangan juga harus bisa membandingkan laporan keuangan antar organisasi untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.1.10. Audit

Audit atau pemeriksaan artinya evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Arens dan Loebbecke, (2003) mengatakan auditing merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi untuk dapat menentukan dan melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan audit menurut Standar audit 200 (Paragraf 3) dilakukan untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju yang dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Audit harus dilakukan oleh independen dan kompeten.

Audit pada umumnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (Haryono, 2014):

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan

sebagai keseluruhan yaitu informasi kuantitatif yang akan diperiksa dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

2. Audit kepatuhan

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihan yang berwenang. Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada seseorang atau pihak yang lebih tinggi yang ada dalam organisasi yang diaudit dan tidak diberikan kepada pihak-pihak diluar perusahaan.

3. Audit Operasional

Audit operasional adalah pengkajian (review) atas setiap bagian dari prosedur dan metode yang diterapkan suatu entitas dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Hasil akhir dari suatu audit operasional biasanya berupa rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi.

2.1.11. *Audit Report Lag*

Menurut Subekti dan Widiyanti (2004:18) menyebutkan bahwa nama lain dari *audit report lag* adalah keterlambatan audit. Lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor diukur dari perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan disebut keterlambatan audit. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang saat ini sudah diganti menjadi Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan laporan keuangan perusahaan *go publik* harus dipublikasikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Kriteria keterlambatan atau lag menjadi tiga kategori (Dyer dan McHugh, 1975), yaitu:

1. *Preliminary lag* merupakan interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.
2. *Auditor's signature lag* merupakan interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai tanggal yang tercantum di dalam laporan auditor. Dari definisi tersebut *Auditor's signature lag* merupakan salah satu nama lain dari keterlambatan audit.
3. *Total lag* merupakan interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *audit report lag* adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. Ada banyak faktor yang mempengaruhi *audit report lag* baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam penelitian ini beberapa faktor yang akan diteliti yang memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* yaitu independensi komite audit, rapat komite audit, kompetensi komite audit, jumlah anggota komite audit, dan masa jabatan komite audit.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Karakteristik Komite Audit dan *Audit Report Lag*

Dalam penelitian ini, karakteristik komite audit yang digunakan sebagai variabel independen adalah independensi komite audit, jumlah rapat komite audit, kompetensi komite audit, jumlah anggota komite audit, dan masa jabatan komite audit. Menurut Agoes (2012), independensi adalah sikap tidak mudah dipengaruhi karena auditor melaksanakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pekerjaannya untuk kepentingan. Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM No: Kep 29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah anggota komite audit paling sedikit tiga orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan dua orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Penelitian yang dilakukan Wardhani dan Raharja (2013) menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hashim dan Rahman (2011) menyatakan bahwa *audit committee independence* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Karakteristik komite audit selanjutnya adalah rapat komite. Rapat komite audit diadakan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI,2002). Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Jika dianggap perlu, komite audit dapat mengundang pejabat eksekutif khususnya pejabat dibidang keuangan untuk menghadiri rapat-rapat komite audit. Menurut FCGI (2002) direktur keuangan dan kepala satuan kerja audit intern dan seorang wakil dari auditor eksternal harus hadir sebagai peserta pada rapat-rapat komite audit. Hasil rapat komite audit disampaikan dalam surat edaran yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Dewan komisaris akan mendapatkan laporan aktivitas pertemuan komite audit dari ketua komite audit. Apabila ditemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris dalam kurun waktu sepuluh hari kerja. Nor et al., (2010) menyatakan bahwa pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Selanjutnya anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang kurangnya ada satu orang yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan (Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015). Berdasarkan pedoman corporate governance, anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. Apadore dan Noor (2013) mengatakan komite audit yang berpengalaman dalam memahami dan mengoperasikan tugas yang dipercayakan kepada mereka dapat lebih memudahkan dalam mengidentifikasi kesalahan dan berkomunikasi dengan auditor eksternal. Purwati (2006) menyatakan bahwa Kompetensi: Keahlian Keuangan Anggota Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan Nomor 55 /POJK.04/2015 Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota. Namun jumlah keanggotaan komite audit di Indonesia bermacam-macam tergantung besar kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab. Jumlah keanggotaan komite yang cukup ideal kira-kira tiga sampai lima orang. Nor et al., (2010) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Keputusan No. 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Bab II Pasal 8 dalam Anggaran Dasar menjelaskan bahwa masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Pengalaman anggota Komite Audit bekerja di sebuah Kantor Akuntan Publik akan memperkuat keahliannya dalam bidang akuntansi dan audit. Keahlian yang dimiliki anggota Komite Audit ini dapat diimplementasikan dalam proses pelaporan keuangan, sehingga laporan dapat memiliki informasi yang relevan dan yang terpenting dipublikasikan tepat pada waktunya. Ika (2011)

menyatakan masa jabatan komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan karena anggota komite audit yang masa jabatan lebih lama, maka komite audit tersebut akan lebih memahami seluk beluk perusahaan serta mengenal karakteristik para manajer/direksi yang mereka awasi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Karakteristik komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

2.2.2. Reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai Variabel Pemoderasi Karakteristik Komite Audit *Audit Report Lag*

Agar suatu laporan atau informasi akan kinerja perusahaan kepada publik akurat dan terpercaya, perusahaan diminta untuk menggunakan jasa KAP. Dalam meningkatkan kredibilitas dari laporan tersebut, perusahaan menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama baik. KAP berdasarkan reputasinya diklasifikasikan menjadi dua yakni KAP big four dan KAP non big four. KAP berskala besar adalah KAP yang sudah dikenal internasional dimana menyediakan jasa audit yang lebih berkualitas daripada KAP berskala kecil (Choi et al, 2007). Dari hasil penelitian Lee (2008) menyatakan bahwa KAP yang berafiliasi dengan Big Four akan menyelesaikan audit pada suatu perusahaan lebih awal daripada KAP non-Big Four. Karena, KAP Big Four diperkirakan memiliki ketersediaan teknologi yang lebih maju dan staf spesialis sehingga, akan lebih efisien dalam melakukan pelayanan jasa audit. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Reputasi kantor akuntan publik memperkuat pengaruh karakteristik komite audit terhadap *audit report lag*.

3. Metode Penelitian

3.1. Sampel Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan manufaktur. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive non random sampling*, yaitu metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi (Nursalam:2008). Kriteria tersebut yaitu:

1. Perusahaan dalam sektor manufaktur yang terdaftar secara terus-menerus di BEI pada tahun 2015-2017
2. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) selama tahun 2015-2017
3. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama tahun 2015-2017
4. Menampilkan data dan informasi yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* untuk periode 2015-2017.

Data perusahaan Asia yang terdaftar di NYSE diperoleh dari www.idx.com dan pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh masing-masing laporan keuangan perusahaan sampel. Berdasarkan hasil pemilihan sampel maka diperoleh bahwa perusahaan Asia menjadi sampel penelitian sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) perusahaan.

3.2. Pengukuran Variabel

3.2.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit report lag*. Afify (2009) menyatakan bahwa *audit report lag* merupakan rentang waktu penyelesaian audit dimulai dari tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal yang tercantum dalam laporan audit. Variabel *audit report lag* diukur dengan cara menghitung jumlah hari antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal penandatanganan laporan auditor.

3.2.2. Variabel Independen

Ada lima komponen variabel independen yang mewakili karakteristik komite audit. Lima komponen yang akan diteliti tersebut dijumlahkan dan direratakan. Variabel independen yang akan diteliti pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu:

a. Independensi Komite Audit

Independensi berarti tidak mudah dipengaruhi karena seorang auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Untuk itu, auditor tidak dibenarkan untuk memihak. Auditor harus melaksanakan kewajibannya untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditor Saripudin, *et al.*, (2012). Variabel independensi komite audit diukur dari proporsi jumlah anggota yang berasal dari luar emiten dengan jumlah anggota komite audit.

b. Jumlah Rapat Komite Audit

Pedoman kerja komite audit yang dikeluarkan oleh BAPEPAM menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan atau minimal sebanyak empat kali dalam setahun. Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Pasal 13 menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Hasil rapat komite audit disampaikan dalam surat edaran yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Dewan komisaris akan mendapatkan laporan aktivitas pertemuan komite audit dari ketua komite audit. Apabila ditemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris dalam kurun waktu sepuluh hari kerja. Variabel ini diukur dari berapa kali komite audit melakukan rapat dalam satu tahun.

c. Kompetensi Komite Audit

Berdasarkan peraturan BAPEPAM tentang komite audit bahwa suatu perusahaan paling tidak memiliki tiga orang komite audit. Anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang kurangnya ada satu orang yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan (Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004). Sedangkan dua lainnya mempunyai keahlian dalam bidang keuangan dan merupakan seorang independen. Berdasarkan pedoman corporate governance, anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Anggota komite audit harus memahami mengenai pelaporan keuangan. Apadore dan Noor (2013) menyatakan komite audit yang berpengalaman dalam memahami dan mengoperasikan tugas yang dipercayakan kepada mereka dapat lebih memudahkan dalam mengidentifikasi kesalahan dan berkomunikasi dengan auditor eksternal. Variabel ini diukur dari proporsi anggota Komite

Audit yang kompeten dengan jumlah anggota komite audit.

d. Jumlah Anggota Komite Audit

Berdasarkan Nomor Kep-315/BEJ/062000 dan Peraturan Bapepam no. IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 bagian C menyatakan anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Namun jumlah anggota komite audit di Indonesia bermacam-macam tergantung besar kecilnya organisasi dan tanggung jawab. Jumlah anggota komite audit yang cukup ideal kira-kira tiga sampai 5 orang.

Kalbers dan Fogarty (1993) menyatakan kualitas dari laporan keuangan akan semakin meningkat dan audit report lag akan menurun biasanya dikarenakan banyak jumlah anggota komite audit. Jumlah anggota komite audit yang banyak cenderung memiliki kekuatan atau power yang lebih besar, memiliki banyak sumber daya (Pincus et al.,1989) serta berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan. Variabel ini diukur dari jumlah anggota komite audit yang ada dalam satu perusahaan.

e. Masa Jabatan Komite Audit

Keputusan No. 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Bab II Pasal 8 menjelaskan bahwa masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Pengalaman anggota Komite Audit bekerja di sebuah Kantor Akuntan Publik akan memperkuat keahliannya dalam bidang akuntansi dan audit. Keahlian yang dimiliki anggota Komite Audit ini dapat diimplementasikan dalam proses pelaporan keuangan, sehingga laporan dapat memiliki informasi yang relevan dan yang terpenting dipublikasikan tepat pada waktunya. Variabel ini diukur dari rata-rata masa jabatan dari keanggotaan komite audit yang menjabat lima tahun berturut-turut.

3.2.3. Variabel Moderasi

Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara satuvariabel dengan variabel lain. Dalam penelitian ini variabel moderasi yang digunakan adalah Reputasi Kantor Akuntan Publik. KAP berdasarkan reputasinya diklasifikasikan menjadi dua yakni KAP big four dan KAP non big four. KAP berskala besar adalah KAP yang sudah dikenal internasional dimana menyediakan jasa audit yang lebih berkualitas daripada KAP berskala kecil (Choi *et al*, 2007). Krishan & Schauer (2001) menyatakan reputasi Kantor Akuntan Publik dapat diproksi dengan ukuran Kantor Akuntan publik. KAP yang memiliki reputasi baik cenderung lebih cepat menyelesaikan audit dikarenakan KAP tersebut memiliki staf yang berkualitas (Boynton; 2001). Variabel reputasi auditor diukur menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* diberi kode 1 sedangkan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non *Big Four* diberi kode 0.

3.3. Model Analisis

Penelitian ini akan menggunakan teknik persamaan regresi moderasi (*Moderated*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Regression Analysis) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dan juga untuk mengetahui apakah variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model penelitian yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah:

Hipotesis I:

$$ARL = \alpha + \beta_1 ARL + \varepsilon$$

Hipotesis II:

$$ARL = \alpha + \beta_1 ARL + \beta_2 REPUTS + \beta_3 ARL \cdot REPUTS + \varepsilon$$

Keterangan:

ARL:	Audit Report Lag
KARAKTR:	Karakteristik Komite Audit
REPUTS:	Reputasi Kantor Akuntan Publik
α :	Konstanta
β :	Koefisien Regresi
ε :	error

4. Analisis Data dan Hasil Pengujian Hipotesis

4.1. Pengujian Normalitas dan Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan dua kali uji regresi. Uji regresi pertama dilakukan untuk mengetahui hipotesis pertama tentang pengaruh karakteristik komite audit terhadap *audit report lag*. Uji regresi kedua dilakukan untuk mengetahui hipotesis kedua tentang apakah reputasi kantor akuntan publik mampu memperkuat pengaruh hubungan karakteristik komite audit terhadap *audit report lag*.

Dalam memenuhi uji statistik tersebut maka diperlukan pengujian normalitas dan asumsi klasik agar hasil penelitian mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan data yang ada. Uji asumsi klasik dilakukan dengan uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Untuk pengujian normalitas dilakukan dengan One Sample Kolmogorov Smirnov.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan (VIF). Suatu regresi mengandung multikolinearitas jika nilai VIF-nya lebih dari 10. Nilai VIF variabel penelitian sebesar 2,025 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas. Pengujian autokorelasi menghasilkan nilai Durbin Waston sebesar 2.087 terletak antara 1.80154 dan 2.19846, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Pengujian normalitas menghasilkan nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov menjadi 0,342 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 yang berarti variabel terdistribusi secara normal.

Tabel 1
Pengujian *Moderated Regression Analysis*

	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	113,031	4,967	22,756	0,000
KARAKTR	-8,991	1,168	-7,698	0,000
REPUTS	-0,584	6,987	-0,084	0,933
KARAKTR* REPUTS	-1,023	1,642	-0,623	0,543

a. Dependent Variable: ARL

Pengujian hipotesis pertama pada tabel 1 menunjukkan bahwa karakteristik komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi anggota komite audit yang independen secara nyata dapat menurunkan *audit report lag* perusahaan. Independensi komite audit penting dalam melakukan pengawasan internal perusahaan, pemeriksaan keefektifan rencana audit, dan laporan auditor internal. Dengan melakukan pengawasan yang ketat komite audit independen tidak akan mudah dipengaruhi oleh pihak yang berada di dalam perusahaan maupun pihak yang berada di luar perusahaan sehingga pelaksanaan audit dapat diselesaikan dengan cepat atau memperpendek waktu *audit report lag*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wardani dan Raharja (2013) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Dengan adanya komite audit independen dalam melakukan pengawasan diharapkan pengawasan yang dilakukan semakin efektif sehingga dapat mempersingkat *audit report lag*. Hasil penelitian ini juga didukung oleh jumlah rapat komite audit yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering diadakan rapat komite audit maka akan mempercepat *audit report lag*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratama (2017). Rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh komite audit merupakan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan fungsi komite audit kepada dewan komisaris sehingga jika frekuensi rapat semakin sering dilakukan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga diharapkan dapat mempersingkat *audit report lag* (Ika:2011). Hasil pengujian selanjutnya juga didukung dengan kompetensi komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang berkompeten dibidang keuangan maka akan dapat mengurangi *audit report lag*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sultana *et al* (2016). Komite audit yang kompeten mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi dan memberi saran kepada Dewan Komisaris agar terciptanya pengawasan yang lebih efektif. Komite audit yang mempunyai kualifikasi keahlian keuangan yang baik diharapkan mampu mengontrol kondisi operasional dan keuangan perusahaan serta dapat melakukan koreksi terhadap kondisi keuangan perusahaan sejak dini. Koreksi kondisi keuangan yang dilakukan dapat dijadikan pedoman oleh manajemen dalam melakukan perbaikan hingga akhir periode keuangan tahunan. Jumlah anggota komite audit yang banyak juga mendukung berkurangnya *audit report lag*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Purwati (2006) dan Nor *et al.*, (2010) yang menunjukkan adanya pengaruh jumlah komite audit terhadap *audit report lag*. Dengan adanya jumlah komite audit yang semakin banyak menunjukkan bahwa komite audit memiliki kekuatan yang lebih besar (Kalbers dan Fogarty: 1993), mempunyai banyak sumber daya

(Pincus *et al.* 1989) sehingga kualitas pelaporan semakin meningkat dan *audit report lag* bisa berkurang. Variabel terakhir yang mendukung hasil pengujian hipotesis di atas adalah masa jabatan. Masa jabatan komite audit yang lebih lama mampu mengurangi *audit report lag* yang terjadi pada suatu perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ika (2011). Masa jabatan komite audit semakin lama maka dapat secara efektif dalam proses pengawasan pelaporan keuangan. Pengalaman dan masa jabatan yang lama dari anggota Komite Audit yang bekerja di sebuah Kantor Akuntan Publik akan memperkuat keahliannya dalam bidang akuntansi dan audit.

Pengujian hipotesis kedua dilakukan untuk mengetahui apakah reputasi kantor akuntan publik mampu memperkuat pengaruh karakteristik komite audit terhadap *audit report lag*. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik tidak memperkuat pengaruh karakteristik komite audit terhadap *audit report lag*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memakai jasa kantor akuntan publik *big four* maupun non *big four* tidak menjamin terlaksananya audit secara efisien dan lebih fleksibel sehingga dapat mengurangi *audit report lag*.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik komite audit memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anggota komite audit yang independen, rapat yang sering dilakukan oleh komite audit, banyaknya jumlah komite audit yang berkompeten dibidang keuangan, serta masa jabatan komite audit yang cukup lama sehingga mampu mengurangi *audit report lag*.
2. Reputasi kantor akuntan publik sebagai variabel pemoderasi tidak signifikan terhadap *audit report lag*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memakai jasa kantor akuntan publik *big four* maupun non *big four* tidak menjamin terlaksananya audit secara efisien dan lebih fleksibel sehingga dapat mengurangi *audit report lag*. Penyebab yang lain yang mungkin terjadi, baik KAP *big four* maupun non *big four* sudah menggunakan standar ISA (*International Standard on Auditing*). Dalam proses pengimplementasian ISA ini tidak menutup kemungkinan masih ada KAP-KAP yang belum dapat melakukan pengimplementasian ISA secara optimal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya, sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat disamaratakan dengan perusahaan lain selain manufaktur. Kedua, periode pengamatan penelitian ini hanya dari tahun 2015-2017, sehingga belum memberikan gambaran hasil yang maksimal dan tidak dapat digeneralisasikan. Ketiga, variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada independensi komite audit, rapat komite audit, kompetensi anggota komite audit, jumlah anggota komite audit, dan masa jabatan komite terhadap *audit report lag* dengan reputasi kantor akuntan publik sebagai variabel pemoderasi. Sebenarnya masih banyak karakteristik komite audit lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk mempengaruhi *audit report lag*.

Berdasarkan hasil analisis dan keterbatasan penelitian di atas, penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *audit report lag*. Penelitiannya selanjutnya disarankan untuk menggunakan sektor perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga sampel tidak hanya berfokus pada perusahaan manufaktur saja. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lain yang dapat mempengaruhi *audit report lag*, memperpanjang periode pengamatan penelitian serta menguji variabel lain yang mampu karakteristik karakteristik komite audit terhadap *audit report lag*.

Daftar Pustaka

- Afify, H.A.E. 2009. *Determinants of Audit Report Lag: Does implementing corporate governance have any impact? Empirical Evidence from Egypt. Journal of Applied Accounting Research, 10(1), pp 56-86.*
- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Jilid 1, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Ahmad, Raja Adzrin Raja & Kamarudin, Khairul Anwar. 2013. *Audit Delay and The Timeliness of Corporate Reporting: Malaysian Evidence. Malaysia: MARA University of Technology.*
- Algifari. 2016. *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Apadore, Kogilavani dan Marjan Mohd Noor. 2013. *Determinants of Audit Report Lag and Corporate Governance in Malaysia. International Journal of Business and Management. Vol 8. No 15.*
- Arens dan Loebbecke. 2003. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Edisi Indonesia. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Arrow, KJ. 1985. "The Economics of Agency" in J.W.Pratt and R.J Zeckhauser, eds, *Principal and Agents, Cambridge:Harvard Business School Perss.*
- Badan Pengawas Pasar Modal, 2004. Kep-29/PM/2004. "Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit".
- Boynton, William C. Johnson., Raymond N. and Kell, Walter G. 2001. "Modern Auditing", Edisi Ketujuh, Jilid 2, Erlangga, Jakarta.
- Choi, Kim., F. Kim., J. B. Kim, and Y. Zang. 2007. "Audit Office Size, Audit Quality, and Audit Pricing".
- Christiawan, Yulius Jogi. 2002. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 4, No.2. Hal 79-92.*
- Eisenhardt, Kathleem. 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of Management Review, 14.* Hal 57-74.
- Forum For Corporate Governance (FCGI). 2002 . *Seri Tata Kelola Perusahaan - Corporate Governance (Jilid I, II, & III) Edisi Kedua.* Jakarta.
- Hashim and Rahman. 2011. *Audit report lag and the Effectiveness of Audit Committee Among Malaysian Listed Companies. International Bulletin of Business Administration*

ISSN: 1451-243X Issue 10 (2011)© EuroJournals, Inc. 2011
<http://www.eurojournals.com>.

- Ika, Siti Rochmah dan Nazli A. Mohd Ghazali. 2011. *Audit Committee Effectiveness and Timeliness of Reporting: Indonesian Evidence. Managerial Auditing Journal. Vol. 27. No. 4.*
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan– edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo
- Imam Subekti. 2005. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Audit Delay* di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen. Volume 6. Nomor 1. Hal 47-54.*
- Ismail, I. Haron et al. 2006. “*Service Quality, Client Satisfaction and Loyalty Toward Audit Firm: Perseption of Malaysian Public Listed Company*”. *Managerial Auditing Journal. Vol.21, No.7, pp 738-756.*
- James, C. Dyer dan Arthur, J. McHugh. 1975. *The Timeliness of the Australian Annual Report. Chicago: University of Chicaho.*
- Jensen, MC dan WH. Meckling, 1976. *Theory of Firm. Journal of Financial Economics.*
- Jensen, Michael C. and Clifford H. Smith Jr., eds. 1984. *The Modern Theory of Corporate Finance. McGraw-Hill.*
- Jusup, Al Haryono. 2014. *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA)*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN.
- Kartika, Andi. 2009. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Maret 2009.*
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- Krishnan, J., & Schauer, P.C. 2001. *Differences in quality among audit firms, Journal of Accountancy, 192(1), 85.*
- Lawrence P. Kalbers and Timothy J. Fogarty. 1993. *Audit Committee Effectiveness: An Empirical Investigation of the Contribution of Power, Auditing : A journal of Practice and Theory 12, 24-49.*
- Lee, Ho-Young and Jahng, Geum Joo. 2008. *Determinants of Audit Report Lag: Evidence From Korea-An Examination of Auditor-Related Factor’s. The Journal of Applied Bussines Research. Volume 24 Number 2.*
- Made Gede Wirakusuma. 2004. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rentang Waktu Penyajian Laporan Keuangan ke Publik (Studi Empiris Mengenai Keberadaan Divisi Internal Audit pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)”.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Simposium Nasional Akuntansi VII. (Desember) : pp 1202.1222.

Nor, Shafie, and Hussin. 2010. *Corporate Governance and Audit report lag in Malaysia. Asian Accademy of Managerial Journal of Accounting and Finance, Vol. 6, No. 2, 57-84, 2010*

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Purwati, A. S. 2006. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Publik yang Tercatat di BEJ. 29 Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi UNDIP Semarang (tidak dipublikasikan)

Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Santoso, Singgih. 2010:234. Statistik Multivariat, Jakarta : PT Gramedia.

Saripudin, Netty Herawati, dan Rahayu. 2012. Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Survey terhadap Auditor KAP di Jambi dan Palembang). E-Jurnal BINAR Akuntansi, Vol.1, No.1, September 2012.

Subekti, Imam. dan N.W. Widiyanti. 2004. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay di Indonesia", Simposium Nasional Akuntansi VII:991-1002.

Suhayati, Ely. 2014. Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Rentang Waktu Penyelesaian Audit. Majalan Ilmiah UNIKOM, Vol. 12, No.1.

Sultana, *et al.* 2015. "Keahlian komite audit, pengalaman komite audit, independensi komite audit, gender komite audit, ukuran komite audit, dan keaktifan komite audit terhadap *audit report lag*".

Utama, M. 2004. Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan Pengungkapan Informasi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1, 61-79

Wardhani, Armania Putri dan Raharja, Surya. 2013. Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Audit report lag*. Diponegoro *journal of Accounting*, volume 2, Nomor 3. ISSN: 2337-3806.

www.idx.co.id

LAMPIRAN I

Nama Perusahaan Sampel dan Data Penelitian

Nomor	PERUSAHAAN	TAHUN	INDP. KA	JML. ANGG. KA	KOMPT. KA.	JML. RAPAT KA.	MASAJBT N. KA.	REPUS	ARL
1	INDAH KIAT PILP & PAPER TBK	2015	5	5	5	6	5	1	69
		2016	5	5	5	6	5	0	68
		2017	5	5	5	6	5	0	65
2	TOBA PULP LESTARI TBK	2015	5	5	5	9	5	0	64
		2016	5	5	5	9	5	1	62
		2017	5	5	5	9	5	0	60
3	SUPARMA TBK	2015	3	3	3	8	5	0	88
		2016	3	3	3	8	5	0	88
		2017	3	3	3	8	5	0	86
4	PABRIK KERTA TJIWI KIMIA TBK	2015	4	4	4	5	5	0	80
		2016	4	4	4	5	5	0	77
		2017	4	4	4	5	5	0	81
5	BARITO PACIFIC TBK	2015	5	5	5	7	5	1	88
		2016	5	5	5	7	5	1	86
		2017	5	5	5	7	5	1	60
6	PT SLJ GLOBAL TBK	2015	5	5	5	8	5	1	59
		2016	5	5	5	8	5	1	58
		2017	5	5	5	8	5	1	57
7	TIRTA MAHAKAM RESOURCES TBK	2015	3	3	3	4	5	0	83
		2016	3	3	3	4	5	0	82
		2017	3	3	3	4	5	0	80
8	KERAMIK INDONESIA ASSOSIASI TBK	2015	3	3	3	4	5	0	75
		2016	3	3	3	4	5	0	82
		2017	3	3	3	4	5	1	87

9	PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK	2015	5	5	5	6	5	0	90
		2016	5	5	5	6	5	0	60
		2017	5	5	5	6	5	0	85
10	DUTA PERTIWI NUSANTARA	2015	3	3	3	4	4	0	90
		2016	3	3	3	4	4	0	79
		2017	3	3	3	4	4	0	79
11	EKADHARMA INTERNATIONAL TBK	2015	5	5	5	8	5	0	58
		2016	5	5	5	8	5	0	57
		2017	5	5	5	8	5	0	59
12	INTANWIJAYA INTERNATIONAL TBK	2015	3	3	3	4	5	0	71
		2016	3	3	3	4	5	0	83
		2017	3	3	3	4	5	0	85
13	PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK	2015	4	4	4	7	4	1	61
		2016	4	4	4	7	4	1	62
		2017	4	4	4	7	4	1	60
14	ALAKASA INDUSTRINDO TBK	2015	5	5	5	4	5	0	88
		2016	5	5	5	4	5	0	85
		2017	5	5	5	4	5	0	86
15	ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY TBK	2015	3	3	3	4	5	0	88
		2016	3	3	3	4	5	0	86
		2017	3	3	3	4	5	0	82
16	SARANACENTRAL BAJATAMA TBK	2015	5	5	5	4	5	0	78
		2016	5	5	5	4	5	0	74
		2017	5	5	5	4	5	0	71
17	BETONJAYA MANUNGGAL TBK	2015	5	5	5	4	5	0	84
		2016	5	5	5	4	4	0	82
		2017	5	5	5	4	4	0	81
18	CITRA TUBINDO TBK	2015	3	3	3	4	4	1	78
		2016	3	3	3	4	4	1	80
		2017	3	3	3	4	4	1	86

19	GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK	2015	5	5	5	8	5	0	81
		2016	5	5	5	8	5	0	80
		2017	5	5	5	8	5	0	81
20	INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TBK	2015	4	4	4	7	4	0	88
		2016	4	4	4	7	4	0	82
		2017	4	4	4	7	4	0	75
21	KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK	2015	5	5	5	10	5	1	45
		2016	5	5	5	10	5	1	47
		2017	5	5	5	10	5	1	49
22	LION METAL WORKS TBK	2015	3	3	3	4	5	0	84
		2016	3	3	3	4	5	0	74
		2017	3	3	3	4	5	0	74
23	LIONMESH PRIMA TBK	2015	3	3	3	4	5	0	84
		2016	3	3	3	4	5	0	74
		2017	3	3	3	4	5	0	74
24	PELAT TIMAH NISANTARA TBK	2015	5	5	5	6	5	1	47
		2016	5	5	5	6	5	1	48
		2017	5	5	5	6	5	1	46
25	PELANGI INDAH CANINDO TBK	2015	4	4	4	6	4	0	49
		2016	4	4	4	6	4	0	47
		2017	4	4	4	6	4	0	41
26	TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK	2015	3	3	3	4	4	1	82
		2016	3	3	3	4	4	1	76
		2017	3	3	3	4	4	1	87
27	JAPFA COMFEED INDONESIA	2015	5	5	5	9	5	0	50
		2016	5	5	5	9	5	0	55
		2017	5	5	5	9	5	0	53
28	MALINDO FEEDMILL TBK	2015	5	5	5	4	5	0	82
		2016	5	5	5	4	5	0	88
		2017	5	5	5	4	5	1	99

29	ARGHA KARYA PRIMA IND. TBK	2015	3	3	3	4	5	1	77
		2016	3	3	3	4	5	1	81
		2017	3	3	3	4	5	1	82
30	ASIAPLAST INDUSTRIES TBK	2015	3	3	3	4	5	1	88
		2016	3	3	3	4	5	1	73
		2017	3	3	3	4	5	1	82
31	BERLINA TBK	2015	3	3	3	4	4	0	90
		2016	3	3	3	4	4	0	86
		2017	3	3	3	4	4	0	86
32	PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK	2015	3	3	3	4	4	1	60
		2016	3	3	3	4	4	1	65
		2017	3	3	3	4	4	1	65
33	CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK	2015	3	3	3	4	5	0	50
		2016	3	3	3	4	5	0	48
		2017	3	3	3	4	5	1	78
34	PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK	2015	3	3	3	4	5	0	88
		2016	3	3	3	4	5	0	83
		2017	3	3	3	4	5	0	81
35	INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY TBK	2015	3	3	3	3	5	0	83
		2016	3	3	3	3	5	0	83
		2017	3	3	3	3	5	0	85
36	KERTAS BASUKI RACHMAT INDONESIA TBK	2015	2	2	2	4	5	0	88
		2016	2	2	2	4	5	0	89
		2017	2	2	2	4	5	0	82
37	TRIAS SENTOSA TBK	2015	5	5	5	6	5	1	55
		2016	5	5	5	6	5	1	54
		2017	5	5	5	6	5	1	52
38	YANAPRIMA HASTAPERSADA TBK	2015	3	3	3	4	5	0	70
		2016	3	3	3	4	5	0	69
		2017	3	3	3	4	5	0	68

39	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK	2015	3	3	3	4	4	1	70
		2016	3	3	3	4	4	1	72
		2017	3	3	3	4	4	1	74
40	SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	2015	5	5	5	10	5	1	46
		2016	5	5	5	10	5	1	48
		2017	5	5	5	10	5	1	45
41	PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK	2015	4	4	4	8	4	0	48
		2016	4	4	4	8	4	0	49
		2017	4	4	4	8	4	0	45
42	FORTUNE MATE INDONESIA TBK	2015	5	5	5	6	5	0	55
		2016	5	5	5	6	5	0	52
		2017	5	5	5	6	5	0	50
43	SAT NUSAPERSADA TBK	2015	3	3	3	4	5	0	75
		2016	3	3	3	4	5	0	86
		2017	3	3	3	4	5	0	85
44	KABELINDO MURNI TBK	2015	3	3	3	4	5	0	88
		2016	3	3	3	4	5	0	83
		2017	3	3	3	4	5	0	86
45	SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION TBK	2015	3	3	3	4	4	0	78
		2016	3	3	3	4	4	0	76
		2017	3	3	3	4	4	0	82
46	VOKSEL ELECTRIC TBK	2015	3	3	3	4	4	0	98
		2016	3	3	3	4	4	0	76
		2017	3	3	3	4	4	0	85
47	ASTRA INTERNATIONAL TBK	2015	4	4	4	7	4	1	56
		2016	4	4	4	7	4	1	55
		2017	4	4	4	7	4	1	52
48	ASTRA OTOPARTS TBK	2015	4	4	4	7	4	1	51
		2016	4	4	4	7	4	1	50
		2017	4	4	4	7	4	1	51

49	INDO KORDSA TBK	2015	3	3	3	5	5	1	82
		2016	3	3	3	5	5	1	81
		2017	3	3	3	5	5	1	85
50	GOODYEAR INDONESIA TBK	2015	3	3	3	4	5	1	88
		2016	3	3	3	4	5	1	87
		2017	3	3	3	4	5	1	86
51	GAJAH TUNGGAL TBK	2015	4	4	4	8	4	1	59
		2016	4	4	4	8	4	1	57
		2017	4	4	4	8	4	1	56
52	INDOSPRING TBK	2015	3	3	3	2	4	0	88
		2016	3	3	3	2	4	0	83
		2017	3	3	3	2	4	0	85
53	MULTISTRADA ARAH SARANA TBK	2015	3	3	3	4	4	1	81
		2016	3	3	3	4	4	1	86
		2017	3	3	3	4	4	1	85
54	SELAMAT SEMPURNA TBK	2015	5	5	5	7	5	1	69
		2016	5	5	5	7	5	1	67
		2017	5	5	5	7	5	1	64
55	POLYCHEM INDONESIA TBK	2015	3	3	3	5	5	1	88
		2016	3	3	3	5	5	1	74
		2017	3	3	3	5	5	1	85
56	ERATEX DJAJA TBK	2015	3	3	3	4	5	0	88
		2016	3	3	3	4	5	0	86
		2017	3	3	3	4	5	0	81
57	INDORAMA SYNTHETICS TBK	2015	3	3	3	4	5	1	89
		2016	3	3	3	4	5	1	81
		2017	3	3	3	4	5	1	71
58	ICTSI JASA PRIMA TBK	2015	3	3	3	4	4	1	90
		2016	3	3	3	4	4	1	89
		2017	3	3	3	4	4	1	78

59	ASIA PACIFIC FIBERS TBK	2015	4	4	4	8	4	0	69
		2016	4	4	4	8	4	0	65
		2017	4	4	4	8	4	0	63
60	INDO ACIDATAMA TBK	2015	3	3	3	5	5	0	71
		2016	3	3	3	5	5	0	76
		2017	3	3	3	5	5	0	71
61	PT STAR PETROCHEM TBK	2015	3	3	3	4	5	0	88
		2016	3	3	3	4	5	0	89
		2017	3	3	3	4	5	0	86
62	TIFICO FIBER INDONESIA TBK	2015	3	3	3	4	5	1	82
		2016	3	3	3	4	5	1	81
		2017	3	3	3	4	5	1	85
63	TRISULA INTERNATIONAL TBK	2015	5	5	5	10	5	0	47
		2016	5	5	5	10	5	0	45
		2017	5	5	5	10	5	0	48
64	UNILEVER INDONESIA TBK	2015	3	3	3	4	5	1	90
		2016	3	3	3	4	5	1	76
		2017	3	3	3	4	5	1	57
65	DARYA-VARIA LABORATORIA TBK	2015	3	3	3	4	5	1	68
		2016	3	3	3	4	5	1	68
		2017	3	3	3	4	5	1	68
66	KABLE FARMA TBK	2015	3	3	3	4	3	1	71
		2016	3	3	3	4	3	1	76
		2017	3	3	3	4	3	1	82
67	MERCK TBK	2015	3	3	3	4	3	1	64
		2016	3	3	3	4	3	1	60
		2017	3	3	3	4	3	1	60
68	AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK	2015	3	3	3	4	3	0	88
		2016	3	3	3	4	3	0	83
		2017	3	3	3	4	3	0	82

69	PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK	2015	4	4	4	6	4	1	61
		2016	4	4	4	6	4	1	65
		2017	4	4	4	6	4	1	60
70	DELTA DJAKARTA TBK	2015	4	4	4	4	3	1	89
		2016	4	4	4	4	3	1	83
		2017	4	4	4	4	3	1	85
71	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	2015	3	3	3	4	3	1	83
		2016	3	3	3	4	3	1	79
		2017	3	3	3	4	3	1	75
72	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	2015	3	3	3	3	3	1	83
		2016	3	3	3	3	3	1	79
		2017	3	3	3	3	3	1	75
73	MULTI BINTANG INDONESIA TBK	2015	5	5	5	5	5	1	74
		2016	5	5	5	5	5	1	59
		2017	5	5	5	5	5	1	53
74	MAYORA INDAH TBK	2015	4	4	4	4	4	0	82
		2016	4	4	4	4	4	0	74
		2017	4	4	4	4	4	0	74
75	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	2015	3	3	3	8	5	1	84
		2016	3	3	3	8	5	1	67
		2017	3	3	3	8	5	1	85
76	HM SAMPOERNA TBK	2015	5	5	5	5	5	1	61
		2016	5	5	5	5	5	1	65
		2017	5	5	5	4	5	1	65
77	BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA TBK	2015	3	3	3	4	4	1	76
		2016	3	3	3	4	4	1	72
		2017	4	4	4	4	4	1	85
78	WISMILAK INTI MAKMUR TBK	2015	4	4	4	4	5	0	78
		2016	4	4	4	4	5	0	86
		2017	4	4	4	4	5	0	82

LAMPIRAN II

Hasil Output SPSS 21

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		234
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	10.19943574
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.051
Kolmogorov-Smirnov Z		.939
Asymp. Sig. (2-tailed)		.342

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KARAKTR*REPUTS, KARAKTR, REPUTS ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: ARL

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.622 ^a	.387	.379	8.76864	2.087

a. Predictors: (Constant), LAG_x1x2, LAG_x1, LAG_x2

b. Dependent Variable: LAG_Y

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16764.693	3	5588.231	48.827	.000 ^b
	Residual	26323.460	230	114.450		
	Total	43088.154	233			

a. Dependent Variable: ARL

b. Predictors: (Constant), KARAKTR*REPUTS, KARAKTR, REPUTS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	113.031	4.967		22.756	.000		
	KARAKTR	-8.991	1.168	-.565	-7.698	.000	.494	2.025
	REPUTS	-.584	6.987	-.021	-.084	.933	.040	24.922
	KARAKTR*REPUTS	-1.023	1.642	-.164	-.623	.534	.039	25.934

a. Dependent Variable: ARL

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	KARAKTR	REPUTS	KARAKTR*REPUTS
1	1	3.355	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.604	2.357	.01	.01	.01	.01
	3	.035	9.725	.14	.14	.15	.15
	4	.006	23.688	.86	.86	.84	.84

a. Dependent Variable: ARL